

PEMETAAN SOSIAL UNTUK MEMAKSIMALKAN KEBIJAKAN CSR OLEH PT. SBA DI LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR

Nasrul Z.¹⁾, Aulina Adamy^{2)*}, Wardiati³⁾, Taufik⁴⁾

¹⁾Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

^{2)*}Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

³⁾Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

⁴⁾Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar Raniry, Aceh, Indonesia.

e-mail: aulina.adamy@unmuha.ac.id

ABSTRACT

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten yang paling barat di Indonesia dan merupakan kabupaten dengan peringkat ke-15 termiskin di antara total 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Yang membuat kabupaten ini berbeda adalah kehadiran perusahaan nasional PT. Solusi Bangun Andalas (SBA), persisnya di Kecamatan Lhoknga. Sebagai salah satu perusahaan milik negara, PT SBA memiliki kewajiban mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masyarakat sekitar perusahaan. Agar mengoptimalkan program CSR, maka dilaksanakan pemetaan sosial selama satu bulan. Tujuannya untuk mendapatkan data kondisi dan potensi desa sehingga program CSR yang diusulkan tepat dalam kerangka *sustainability livelihood*. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat program yang selama ini telah dilakukan oleh PT. SBA dinilai kurang maksimal terutama oleh masyarakat sekitar. Hasil pemetaan sosial adalah menemukan kelompok/ organisasi sebagai jaringan sosial di desa, aktor-aktor di desa serta dukungan dan kepentingannya, forum-forum yang selama ini menjadi media komunikasi dan negosiasi di desa, serta yang terpenting isu-isu, potensi dan masalah dalam bidang *livelihood* di desa. Hasil ini sudah diterima oleh PT. SBA dan menjadi modal bagi mereka memberikan solusi dalam rencana strategis implementasi CSR yang akan dan sedang dilakukan oleh PT. SBA.

Keywords: Pemetaan Sosial; CSR; Aceh.

PENDAHULUAN

Kecamatan Lhoknga terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2,969,00 km² mencakup 23 kecamatan dan 604 desa (*gampong* merupakan istilah dalam Bahasa Aceh). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Aceh Besar,), total penduduk pada 2023 lalu di kabupaten ini berjumlah 432,49 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di kabupaten Aceh Besar, data per 30 November 2023 tercatat 13,38%. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kabupaten Aceh Besar dalam tren turun, bergerak dari kemiskinan sebesar 16,13% persen menuju ke 13,38% (Darmawan, A.D., 2024). Dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh, persentase penduduk miskin di kabupaten ini berada di urutan 15 dari 23 kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Hasil penelitian Maulana, R. (2019) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan serta banyaknya jumlah tanggungan keluarga yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 1. Peta Lhoknga, Aceh Besar (Sumber: Profil Kawasan Aceh Besar, n.d.)

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) adalah perusahaan publik di Indonesia dengan mayoritas sahamnya (83,52%) dimiliki dan dikelola oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG. SBI menjalankan usaha yang terintegrasi terdiri dari semen, beton siap pakai, agregat dan layanan pengelolaan limbah. SBI mengoperasikan empat pabrik semen di Narogong (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tuban (Jawa Timur), dan Lhoknga (Aceh), dengan total kapasitas 14,8 juta ton semen per tahun dan mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan (Solusi Bangun Indonesia, 2024).

PT. SBA di Pabrik Lhoknga telah mengalokasikan area konservasi sekitar 35 ha di tambang batu gamping dan 16,75 ha di tambang siltstone. Kolaborasi tim yang terstruktur dan sistematis serta kesiapan dalam mengikuti arahan dari konsultan untuk melakukan perbaikan, merupakan salah satu pendorong utama tercapainya peringkat Hijau untuk kedua kalinya bagi Pabrik Lhoknga di tahun 2022. Termasuk di antaranya adalah Koperasi Syariah (KopSyah) yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat melalui koperasi simpan pinjam sistem syari'ah. Pada aspek lingkungan, Pabrik Lhoknga menerapkan inisiatif penghematan penggunaan air bersih melalui instalasi fasilitas daur ulang air untuk proses pendinginan mesin, serta penurunan beban pencemar air melalui instalasi drum filtrasi limbah cair di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) air domestic (Solusi Bangun Indonesia, 2024).

Akan tetapi, kehadiran PT. SBA di Lhoknga juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama bagi masyarakat sekitar, Berikut beberapa isu yang tercekam dalam jejak media daring: 1.) Krisis air bersih saat musim kemarau tiba yang dikaitkan dengan aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT. SBA juga menyoroti sikap PT. SBA dinilai pasif merespons kondisi kekeringan ini (Zulfurqan, 2024); 2.) Sengketa lahan antara warga dan PT SBA yang masih terus menjadi polemik dan belum menemukan titik temu (Syawaluddin, 2022); 3.) PT. SBA dinilai bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan di wilayah Kecamatan Lhoknga dan Leupung (Luwi, A., 2020); dan 4.) Dana CSR dinilai tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Padahal selama 10 tahun terakhir,

total dana CSR perusahaan untuk dua kecamatan yang masuk dalam wilayah ring 1 perusahaan tersebut mencapai Rp 30 miliar atau Rp 3 miliar per tahun (Kontras Aceh, 2021).

Karena persoalan-persoalan di atas, PT. SBA terus berupaya mengoptimalkan semua program CSR. Salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) sehingga program yang dilakukan benar-benar merupakan program yang dibutuhkan masyarakat (Amiruddin, et al., 2020). Pada Tahun 2016, PT. SBA telah membuat pemetaan sosial akan tetapi dinilai harus dilakukan *update* data sehingga dibutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi terakhir masyarakat yang menjadi dampingan PT. SBA yaitu di Kemukiman Lhoknga dan Kemukiman Lhamlom (Zaman, N., et al., 2021). Tim dosen dari beberapa universitas di Aceh diminta untuk membantu PT. SBA dalam melakukan penyempurnaan data pemetaan sosial ini

TINJAUAN PUSTAKA

PT. SBA sebagai salah satu perusahaan milik negara yang memiliki kewajiban mengimplementasikan program CSR nya di masyarakat sekitar perusahaan. Sebagai perusahaan pemerintah, PT. SBA diikat oleh beberapa undang-undang yang cukup kuat di antaranya; Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (R. Indonesia, 2007), Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (R. Indonesia, 2003), Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (R. Indonesia, 2007) dan dipertegas dengan keluarnya aturan teknis pelaksanaan CSR melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang menjabarkan secara teknis kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (R. Indonesia, 2012).

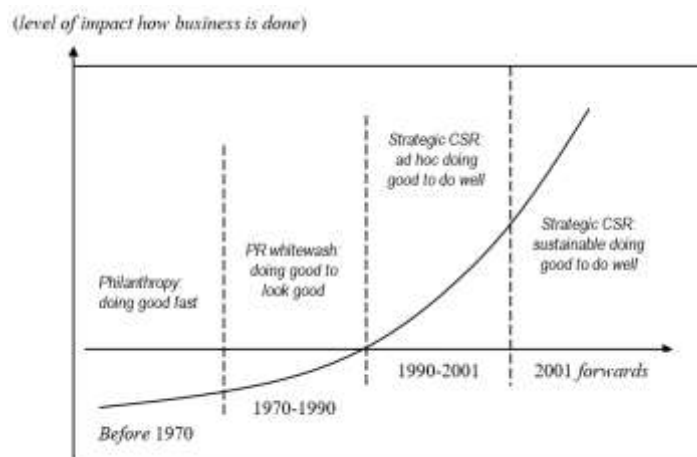
World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide dan gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu konsep, metode, produk, tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga memberdayakan tersebut adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto, 2010c). Konsep pemberdayaan menurut Pranarka et al. (1996 cit. Mardikanto, 2010c) adalah menjadikan manusia tersebut subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, sehingga pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Skjaerseth et al. (2004) menyatakan bahwa periode sekarang telah memasuki era tantangan baru dalam pengelolaan “makro CSR” sebagai konsekuensi tidak langsung dari kenaikan pendapatan yang signifikan dari dunia industri pada negara lokasi produksi dan masyarakat serta isu-isu yang menguat tentang korupsi, kontroversi hak asasi manusia dan lambatnya kemajuan demokrasi di negara berkembang, sedangkan pada tataran “mikro

CSR” mencakup efek langsung pada masyarakat lokal dari kegiatan perusahaan, pekerjaan, kondisi kerja, pendidikan lokal dan perawatan kesehatan. Pelaksanaan program CSR berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para stakeholders dan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri (Murad, 2020).

Sudah cukup banyak studi akademis yang telah menganalisis hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas, seperti yang disampaikan Wu, M.L. & Yeh, D. (2006), yang meta-analisisnya menunjukkan bahwa biaya yang tinggi dalam CSR sebenarnya minimal karena perusahaan mendapatkan manfaat dari kegiatan CSR tersebut. Hart, S.L. (2005) juga menambahkan bahwa CSR pada perkembangannya dapat menjadi alat perusahaan yang digunakan secara taktis untuk meredam kritik dan melindungi citra perusahaan atau juga dapat dijadikan alat yang efektif dalam masyarakat yang demokratis untuk membuat perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dengan menciptakan etos bisnis yang berkelanjutan.



Sumber: Siwar, C. dan Haridzan, SH.M. 2008, ICR Malaysia Starbiz.

Gambar 2. Periodeisasi implementasi CSR dalam dunia usaha dimulai dari perubahan cara pandang CSR dan strategi pelaksanaannya mulai tahun 1970 s/d 2001-an.

Berdasarkan Gambar 2, CSR terus berkembang dari masa ke masa dan berkaitan dengan persepsi masyarakat, Bibu, N. et. al. (2010) menyebutkan implementasi program CSR hingga saat ini terdiri atas beberapa jenis di antaranya: mempromosikan hal atau kasus tertentu, berkaitan dengan pemasaran produknya, pemasaran sosial, filantropi perusahaan, mendorong karyawan menjadi tenaga sukarela, dan bertanggung jawab sosial pada praktik bisnisnya.

METODE

Pemetaan sosial adalah proses pengumpulan dan penggambaran (*profiling*) data dan informasi, termasuk potensi, kebutuhan dan permasalahan (sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan) masyarakat (Chamber, R., 1992). Dengan pemetaan sosial dapat ditemui kenali kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, bahkan dapat diketahui masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah.

Social mapping ini dilakukan sejak 23 Februari s/d 24 Maret 2021 pada 2 (dua) gampong yaitu Gampong Weuraya dan Gampong Meunasah Mesjid di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah operasi Ring 1 dan Ring 2 dari PT. SBA atau mewakili Kemukiman Lhoknga dan Kemukiman Lamlhom Kabupaten Aceh Besar (Zaman, N., et al., 2021). *Social mapping* ini merupakan penelitian survei eksploratif dengan analisis deskriptif seperti yang dimaksudkan Netting, F.E., 1993) yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Untuk narasumber dalam penelitian ini terpilih 20 kriteria yang bisa dijadikan narasumber dalam penelitian dan jumlahnya dibatasi 18 orang narasumber untuk setiap gampongnya. Kriteria dan peran yang dapat dijadikan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Narasumber

No.	Kriteria	No.	Kriteria
1.	Geuchik	11.	Kader Kesehatan
2.	Tuha Peut	12.	Kader KPM
3.	Imam gampong	13.	Ketua/Pengurus Organisasi di gampong
4.	Ketua pemuda	14.	Keujreun Blang
5.	Ketua PKK	15.	Panglima laot/Panglima Uteun
6.	Petani	16.	Tokoh Perempuan
7.	Nelayan	17.	Tokoh Remaja
8.	Peternak	18.	Usaha kecil (warung/ kedai, dll)
9.	Pelaku usaha wisata	19.	Sektor informal/buruh harian/tukang
10.	Ketua BUMG	20.	Karyawan PT. SBA

Social mapping dilakukan dengan survei formal dengan metode rapid Rural Appraisal (RRA) dengan cara in-depth interview menggunakan metode schedule terbuka dan observasi langsung. In-depth interview menggunakan pertanyaan terbuka yang dibantu dengan guide line untuk membantu para peneliti lapangan. Metode pemantauan cepat tersebut meliputi: (1) Wawancara Warga Kunci; (2) Pengamatan Langsung; (3) Pengolahan data sekunder. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang data utamanya adalah kualitatif dan didukung oleh data-data kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif *descriptive analysis* (Zaman, N., et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait kegiatan *social mapping* ini melakukan proses pemetaan kondisi sosial masyarakat yang berada di sekitar pabrik PT. SBA meliputi 2 *gampong* yaitu *Gampong Weuraya* dan *Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom*. Sehingga pada pembahasan selanjutnya akan membahas profil kedua *gampong* tersebut baik segi wilayah, kependudukan, sosial, perhubungan dan komunikasi, dan perekonomian.

Gampong Meunasah Mesjid

Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom merupakan *gampong* yang berada dalam kemukiman Lamlhom (Luas mukim 12,04 km²) dengan luas wilayah *gampong* sebesar 0,21 km² atau 21 Ha yang seluruh wilayahnya dimanfaatkan berdasarkan jenis penggunaan yaitu lahan non sawah 21 Ha, artinya di *gampong* ini tidak ada lahan sawah.

Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom memiliki populasi penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan penduduk dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Lebih rinci jumlah penduduk Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom dalam dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Profil Penduduk Gampong Meunasah Mesjid

Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Seks Ratio	Pertumbuhan Penduduk 3 thn terakhir			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Jumlah Rumah Tangga
Pria	Wanita			2017	2018	2019		
293	263	502	91	483	493	502	2300	116

Data Tabel 2 di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun di Gampong Meunasah Mesjid diperkirakan sekitar 2%/tahun atau sama dengan di bawah rata-rata nasional. Dari kondisi sarana prasarana yang ada di Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom dalam upaya mendukung kegiatan kemasyarakatan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, olahraga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom

Pendidikan			Kesehatan					Masjid	Meunasah	Sarana Olah raga
SD/SLTP	MTs/SMU	MA	Pustu	Polin-des	Praktik dokter	Praktik Bidan	Pos-yandu			
2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Volley Ball & Lap. Sepakbola

Jika dilihat pada Tabel 3, kondisi sarana dan prasarana Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom jauh lebih baik daripada beberapa gampong lain di Kemukiman Lhoknga, dimana sarana kesehatan di gampong ini dapat dinyatakan lengkap dengan ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan. Untuk sekolah tersedia dua unit gedung dan sarana olahraga yang cukup lengkap.

Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom berada dalam beberapa pentahapan keluarga sejahtera dengan sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah pertanian dan sumber air minum yang dikonsumsi adalah air kemasan. Jumlah penduduk yang masuk pentahapan keluarga sejahtera di *gampong* ini juga lebih baik dari Gampong Weuraya. Berikut beberapa hasil pentahapan keluarga sejahtera dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Gampong Meunasah Mesjid

Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	
0	13	21	48	0	82

Data Tabel 4 di atas menunjukkan kalau semua warga *gampong* sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan utama kehidupan sehari-harinya dan warga Meunasah Mesjid

bisa dikelompokkan dalam rata-rata keluarga sejahtera II yang telah terpenuhi makan 3 kali sehari dengan beberapa kemampuan memenuhi kebutuhan lainnya.

Sarana pendukung perekonomian Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom sudah memiliki warung/kedai sebanyak 10 unit, toko/warung kelontong sebanyak 16 unit. Sarana perekonomian ini juga didukung dengan adanya pasar dengan bangunan semi permanen satu unit dan keberadaan kelompok pertokoan satu unit.

Untuk kondisi perhubungan dan komunikasi di Gampong Meunasah Mesjid Lamlhom sudah memiliki jenis jalan utama antar gampong dengan kondisi aspal dan dapat dilalui kendaraan roda 4, sedangkan untuk jenis penerangan sudah menggunakan listrik pemerintah (PLN). Untuk sarana komunikasi sudah tersedia dan mendukung untuk TV dan Telp/Hp, sedangkan jaringan radio tidak tersedia.

Analisis Sosial Gampong Meunasah Mesjid

Dalam konteks pendidikan formal, walaupun rerata penduduk sudah bersekolah sampai SLTA, namun tidak banyak penduduk yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, akibatnya kapasitas warga dalam sumber daya manusia dalam bidang pendidikan ini dapat dikatakan tidak berkembang dan tidak lebih maju dari generasi sebelumnya.

Dalam konteks pendidikan informal yang lebih luas, misalnya terkait kecakapan hidup, bisa dianggap masyarakat belum mendapat pendidikan yang memadai. Padahal sebenarnya dalam konteks pendidikan, masyarakat membutuhkan pendidikan maupun pelatihan informal dalam semua sektor. Sebagai contoh pendidikan keterampilan berusaha (tani, produksi kue dan jajanan, ternak, kebun dagang, pemasaran, dsb), keterampilan pengasuhan anak dan keluarga.

Termasuk di dalamnya pendidikan atau informasi tentang kesehatan seperti kesehatan anak, kesehatan lansia, kesehatan reproduksi, gizi dan sebagainya, atau juga informasi tentang bagaimana pencegahan dan penanganan hipertensi, DM, kolesterol, stress dan sebagainya.

Para pihak yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan di tingkat kecamatan, Kabupaten dan propinsi atau pihak non pemerintah lainnya pun, sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah melakukan kegiatan di gampong untuk berbagi ilmu dan informasi kepada masyarakat. Informasi yang didapat dari luar hanya berupa akses internet dan akses siaran televisi yang tentunya tidak punya tujuan dan capaian yang jelas di masyarakat. Mungkin ada yang pernah dilakukan oleh pabrik semen dan pemerintah, namun sangat terbatas dan tidak berkelanjutan.

Gampong Weuraya

Gampong Weuraya merupakan *gampong* yang berada dalam kemukiman Lhoknga (Luas mukim 31,30 km²) dengan luas wilayah *gampong* sebesar 0,21 km² atau 21 Ha yang seluruh wilayahnya dimanfaatkan berdasarkan jenis penggunaan yaitu lahan sawah 3 Ha dan lahan non sawah 18 Ha. Gampong Weuraya memiliki populasi penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pertumbuhan penduduk dalam 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Lebih rinci jumlah penduduk Gampong Weuraya dalam dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Profil Penduduk Gampong Weuraya

Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	Seks Ratio	Pertumbuhan Penduduk 3 thn terakhir			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	Jumlah Rumah Tangga
Pria	Wanita			2017	2018	2019		
476	444	920	107	885	903	920	4214	234

Data Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan terjadi pertumbuhan rata-rata penduduk di Gampong Weuraya sebesar 2%/tahun atau tidak lebih besar dari pertumbuhan rata-rata nasional. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial yang ada di Gampong Weuraya dalam upaya mendukung kegiatan kemasyarakatan sehari-hari dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, olahraga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Sarana dan Prasarana Gampong Weuraya

Pendidikan			Kesehatan					Masjid	Meunasah	Sarana Olahraga
SD/SLTP	MTs/SMU	MA	Pustu	Polin-des	Praktik dokter	Praktik Bidan	Pos-yandu			
1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Volley Ball

Pelayanan kesehatan dasar relatif baik dan lengkap, dalam hal pendidikan hanya ada untuk tingkat dasar (SD) tersedia masjid dan meunasah juga tersedia lapangan olahraga *volley ball*. Sedangkan berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat Gampong Weuraya berada dalam beberapa pentahapan keluarga sejahtera dengan sumber penghasilan utama masyarakatnya adalah pertanian dan sumber air minum yang dikonsumsi adalah air kemasan. Berikut beberapa hasil pentahapan keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera Gampong Weuraya

Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	
0	89	153	35	12	289

Tabel 8 tersebut menunjukkan jumlah Keluarga Sejahtera I lebih sedikit dibanding keluarga sejahtera kelas lainnya. Artinya keluarga yang ada di Weuraya umumnya telah berkehidupan yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Berdasarkan RPJM Gampong 2020 diketahui jumlah warga miskin adalah sejumlah 6 KK.

Sarana pendukung perekonomian Gampong Weuraya sudah memiliki satu unit Koperasi Unit Gampong (KUD), toko/warung kelontong sebanyak empat unit. Namun sarana lainnya seperti mini market, pasar dan keberadaan kelompok pertokoan belum tersedia di *gampong* ini.

Analisis Sosial Gampong Weuraya

Keadaan pendidikan warga gampong yang relatif baik disebabkan semua warga masyarakat dapat dengan mudah mengakses semua strata pendidikan mulai TPA, PAUD

sampai perguruan tinggi. Pendidikan yang baik tersebut juga memberi pengetahuan untuk berkemampuan mengakses semua layanan masyarakat seperti kesehatan, peningkatan keterampilan dan mengakses informasi yang semakin terbuka. Kemampuan mengakses informasi dari semua sumber menyebabkan warga gampong dapat mengikuti info lowongan jika ada pekerjaan dari perusahaan SBA atau perusahaan mitranya.

KESIMPULAN

Berikut disampaikan kesimpulan dari *social mapping* dengan metode Rapid Rural Appraisal:

Kemiskinan dan pengangguran;

Jumlah warga KK tergolong miskin jauh lebih sedikit dari keluarga sejahtera I s/d III, ini mengindikasikan bahwa warga telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, namun kibat wabah covid-19 pendapatan masyarakat semakin menurun. Lahan pekerjaan hanyalah berharap pada perusahaan kontraktor PT. SBA untuk warga Weuraya sedangkan warga Meunasah Mesjid sumber pendapatannya dari usaha pembuatan kue oleh kelompok perempuan. Sementara lahan sawah dan kebun masyarakat belum bisa diolah optimal karena tidak ada sumber air dan sebagian masih tertimbun tanah.

Kriminalitas, kependudukan dan putus sekolah:

Hampir tidak ditemukan kriminalitas kecuali 1 kali pencurian dan pernah ada wisatawan yang mabuk-mabukan di pantai selebihnya hingga saat ini tidak pernah terjadi. Soal pertengkaran keluarga juga bisa disebut tidak pernah terjadi yang sampai aparat gampong harus turun tangan. Jumlah warga yang merantau dan pindah ke gampong juga relatif sangat terbatas jumlahnya kecuali beberapa pekerja PT. SBA yang tinggal menyewa rumah. Rata-rata lama pendidikan pendidikan warga adalah 12 tahun atau mencapai SLTA meski untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sangat jarang.

Mata pencaharaan utama penduduk;

Gampong yang dekat dengan PT. SBA umumnya bekerja pada lingkup alur produksi semen baik di PT. SBA maupun pada kontraktor dan mitranya. Selebihnya bekerja sebagai petani musiman dan pembuat jajanan kue yang dijual ke luar gampong.

Harus ada upaya yang mampu mendorong setiap warga untuk berkeinginan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, bisa melalui beasiswa pemerintah, PT. SBA (EVE), atau lembaga-lembaga lain yang ada. Manajemen keuangan mikro bagi pengelola lembaga keuangan di gampong serta tata kelola pendapatan bagi rumah tangga perlu rutin dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan untuk menunjang kehidupan lebih baik. Lahan sawah dan kebun merupakan aset yang bernilai tinggi dan perlu diupayakan untuk dapat ditanami sepanjang tahun oleh masyarakat.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada PT. SBA yang sudah memberikan dana untuk pelaksanaan social mapping di Lhoknga. Terima kasih juga disampaikan kepada warga Gampong Meunasah Mesjid dan Gampong Weuraya yang bersedia diwawancara dan membantu pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENCES

- BPS Kabupaten Aceh Besar. (2021). *Kecamatan Lhoknga Dalam Angka 2021*. Aceh Besar: BPS. ISSN: 2407-5078.
- Darmawan, A.D. (2024). *13,38% Penduduk di Kab. Aceh Besar Masuk Kategori Miskin*. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/02/13-38-penduduk-di-kab-aceh-besar-masuk-kategori-miskin>
- Maulana, R. (2019). *Analisis Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia).
- Profil Kawasan Aceh Besar*. (n.d). Diambil 27 Juni 2024, dari <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-aceh-besar>
- Solusi Bangun Indonesia. (2024). *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia*. Diambil dari <https://solusibangunindonesia.com/pabrik-lhoknga/>
- Zulfurqan. (2024). *Dikaitkan dengan Krisis Air Bersih di Lhoknga, Ini Pernyataan Resmi PT SBA*. Diambil dari <https://theacehpost.com/dikaitkan-dengan-krisis-air-bersih-di-lhoknga-ini-pernyataan-resmi-pt-sba/>
- Syawaluddin (2022). *Miris Sengketa Tanah Ulayat Dengan PT. SBA Lhoknga Masih 'Life Service'*. Diambil dari <https://mediaaceh.co.id/miris-sengketa-tanah-ulayat-dengan-pt-sba-lhoknga-masih-life-service/>
- Luwi, A. (2020). *Soal Pencemaran Lingkungan di Lhoknga dan Leupung, Ini Rekomendasi DPRK Aceh Besar*. Diambil dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/04/soal-pencemaran-lingkungan-di-lhoknga-dan-leupungini-rekomendasi-dprk-aceh-besar>
- Kontras Aceh. (2021). *Soal Dana CSR, PT SBA Tak Boleh Lepas Tangan*. Diambil dari <https://www.kontrasaceh.net/2021/03/10/soal-dana-csr-pt-sba-tak-boleh-lepas-tangan/>
- Amiruddin, I., Hasniati, & Yunus, M. (2020). Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3): 351-364.
- Zaman, N., Eljodas, N., Adamy, A., Wardiati, Taufik, Murni, Fadli, Asmadi, D. (2021). *Social Mapping Report*. Banda Aceh: CSR Institut.
- R. Indonesia. (2007). *Penanaman Modal in: R. Indonesia*. (Ed.), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.
- R. Indonesia. (2003). *Badan Usaha Milik Negara*, in: R. Indonesia. (Ed.), Undang-Undang No. 19 Tahun 2003.
- R. Indonesia. (2007). *Perseroan Terbatas*, in: R. Indonesia (Ed.), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
- R. Indonesia. (2012) *Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas*, in: R. Indonesia. (Ed.), Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.
- World Bank. (2001). *Attacking Poverty with A Three-Pronged Strategy*, World Bank Policy and Research Bulletin Vol. 11 No.4/Vol. 2 No. 1 October-December 2000/January-March 2001.

- Mardikanto, T. (2010a). *Komunikasi Pembangunan. Program Pascasarjana Program Studi Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Skjaereth, J.B., Tangen, K., Swanson, P.P., Christiansen, A.C., Moe, A., Lunde, L. (2004). *Limits To Corporate Social Responsibility: A Comparative Study of Four Major Oil Companies*, Fridtjof Nansen Institute. Norway. Report No. 7.
- Murad, A. (2020). Pengaruh Corporate *Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dan Volume Perdagangan (Studi Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017). *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 8(2): 152–166.
- Wu, M.L. & Yeh, D. (2006). Corporate Social Performance, Corporate Financial Performance, and Firm Size: A Meta-Analysis. *Journal of American Academy of Business*, Cambridge Vol. 8. pp. 163-171.
- Hart, S.L. (2005). *Innovation, Creative Destruction and Sustainability*. Cornell University: Industrial Research Institute.
- Bibu N., Nastase M., Gligor DC. (2010). The Perception over Corporate Social Responsibility in Romania. *Review of International Comparative Management*, Vol. 11. Issue 5. pp.764-778.
- Chambers, R. (1992) Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. Discussion Paper #311, Institute of Development Studies, Sussex, UK.
- Netting, F. E., Peter M. Kettner, & Steven L. McMurtry. (1993). *Social Work Macro Practice*. New York: Longman.

(revised 2019)